

ABSTRAKSI

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No 1 Tahun 2017 umumnya merupakan suatu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata. Adapun judul penelitian ini adalah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah di Kabupaten Demak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses pendaftaran tanah, hambatan-hambatan yang terjadi selama pproses pelaksanaan PTSL dan solusinya, serta bagaimana kepastian hukum atas hak milik tanah yang sudah terdaftar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris dengan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi yang terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan urutan proses pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sehingga sudah tercetak 974 sertifikat sampai saat ini. Walaupun masih ditemukan beberapa hambatan mengenai subyek pendaftar tanah, namun dapat diatasi dengan kesadaran dari semua pihak dan langkah-langkah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan diterbitkannya sertifikat memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat atas tanah yang dimiliki. Dengan adanya sertifikat tersebut maka ketika dibutuhkan data untuk keperluan desa maupun individu akan lebih mudah untuk pendataan dalam berbagai kebutuhan. Dengan adanya sertifikat juga dapat menghindarkan dari adanya sengketa tanah.

Kata kunci: Pelaksanaan pendaftaran tanah, jaminan kepastian hukum, sertifikat, hak atas tanah

ABSTRACT

The implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) conducted by the Government based on Minister of Agrarian Regulation No. 1 of 2017 is generally an activity of land registration for the first time carried out simultaneously which includes all objects of land registration that have not yet been registered in one village or other name that is equal to that in order to provide legal certainty and legal protection of the rights to public land fairly and evenly. As for the title of this study is the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Order to Ensure Legal Certainty of Land Ownership in Demak Regency. The purpose of this paper is to find out the land registration process, obstacles that occur during the process of implementation of PTSL and the solution, as well as how the legal certainty of land ownership rights that have been registered.

The research method used in this research is the Empirical Juridical approach with descriptive analysis techniques. Data collection techniques used are interviews, observations and documentation related to complete systemic land registration (PTSL).

The implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Balerejo Village, Dempet Subdistrict, Demak Regency runs well in accordance with the rules and order of the land registration process in accordance with Government Regulation No. 10 of 1961 and Government Regulation No. 24 of 1997, so that 974 certificates have been printed to date. Although there are still some obstacles found in the subject of land registrants, it can be overcome with awareness from all parties and the steps from the Land Office of Demak Regency that provide counseling to the community. with the issuance of the certificate has a guarantee of strong legal certainty over the land owned. With the existence of these certificates, when needed data for village and individual needs, it will be easier to collect data in various needs. with the existence of a certificate it can also avoid the existence of land disputes.

Keywords: *Implementation of land registration, legal certainty, certificates, land rights*